



STATISTIK

KEUANGAN

DAERAH

Provinsi Kalimantan Tengah

2015-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



STATISTIK

KEUANGAN

DAERAH

Provinsi Kalimantan Tengah

2015-2016

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2015-2016

ISBN : 978-602-6774-94-1
Nomor Publikasi : 62540.1708
Katalog : 7203007.62
Ukuran Buku : 15 x 21 cm
Jumlah Halaman : xvi + 70 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi

Infografis dan Gambar Kulit :

Bidang Statistik Distribusi

Tata Letak :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penyunting :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak Oleh :

CV. Azka Pratama Putra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Hanif Yahya
Penanggung Jawab Teknis	: Bambang Supriono
Penyusun	: Eka Restuti Fajarina Eko Susanto
Koordinator Perwajahan	: Muhammad Said
Tata Letak	: Nella Indriani
Infografis	: Eko Susanto
Gambar Kulit	: Eko Susanto
Penyunting	: Alfina Fasriani

<https://kalteng.bps.go.id/>

KATA PENGANTAR

Publikasi **Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2016** merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar, publikasi ini berisi data statistik keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber data statistik keuangan daerah ini berasal dari data sekunder yang diperoleh berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja secara agregat selama periode tahun 2015 sampai dengan 2016.

Berbagai kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi di masa mendatang. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Palangka Raya, Desember 2017

BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala,



Hanif Yahya, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	4
1.4 Konsep dan Definisi	5
BAB II ULASAN RINGKAS	21
2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	21
2.1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi	22
2.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi	25
2.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30
2.2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30
2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	22
Tabel 2.2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	27
Tabel 2.3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	30
Tabel 2.4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	35

<https://kalteng.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi, 2013-2016 (Triliun).....	21
Grafik 2.2 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi, 2016.....	24
Grafik 2.3 Komposisi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, 2016	25
Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi, 2013-2016.....	27
Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Belanja Langsung Daerah Provinsi, 2016	29
Grafik 2.6 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota, 2016	31
Grafik 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, 2013-2016 (Triliun).....	32
Grafik 2.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota, 2016 (Miliar).....	33
Grafik 2.9 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2016 (Miliar).....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	39
Lampiran 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	40
Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	41
Lampiran 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	42
Lampiran 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	43
Lampiran 6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	44
Lampiran 7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	45
Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	46
Lampiran 9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	47
Lampiran 10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	48
Lampiran 11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	49
Lampiran 12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	50
Lampiran 13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	51

Lampiran 14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2015-2016	52
Lampiran 15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	53
Lampiran 16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	54
Lampiran 17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	55
Lampiran 18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	56
Lampiran 19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2015-2016	57
Lampiran 20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2015-2016	58
Lampiran 21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	59
Lampiran 22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	60
Lampiran 23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	61
Lampiran 24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	62
Lampiran 25. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	63
Lampiran 26. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	64
Lampiran 27. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	65
Lampiran 28. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	66

Lampiran 29. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	67
Lampiran 30. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016.....	68
Lampiran 31. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016	69
Lampiran 32. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016	70

<https://kalteng.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan TengahPendapatan
Daerah9,09% 2015 3,25 Triliun
Rupiah2016 3,55 Triliun
RupiahBelanja
Daerah8,84% 2015 3,48 Triliun
Rupiah2016 3,17 Triliun
RupiahSumber
Utama

1 • DAU (Dana
Alokasi Umum)
36,49% (1,29 Triliun
Rupiah)

2 • Pajak Daerah
26,53% (0,94 Triliun
Rupiah)

Belanja
Utama

Belanja Modal • 1
24,69% (0,78 Triliun
Rupiah)

Belanja Hibah • 2
22,18% (0,70 Triliun
Rupiah)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melakukan rekonstruksi pembangunan daerah yang berkelanjutan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen untuk menentukan kebijakan umum. Dari cara pandang yang konstruktif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah, mengupayakan adanya postur APBD yang mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dilandasi oleh aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam menentukan arah pembangunan secara lebih mandiri. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan pembangunan nasional, peran Pemerintah Daerah perlu didorong untuk mampu mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pembangunan, diantaranya adalah manajemen pengelolaan anggaran. APBD perlu dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga diperoleh optimalisasi capaian kebijakan. Sumber dana pendapatan harus mencerminkan kekuatan finansial di bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Sedangkan belanja daerah harus diarahkan sesuai substansi kebutuhan sebagaimana fungsi keseluruhan unit kerja. Dengan demikian, realisasi pendapatan dan belanja daerah mampu merefleksikan tingginya tanggung jawab moral terhadap amanah seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan.

1.2 Tujuan

Secara garis besar, publikasi Statistik Keuangan Daerah Kalimantan Tengah 2015-2016 ini memberikan informasi mengenai :

- a. Realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Potensi sumber dana daerah dan peranannya terhadap pembangunan daerah selama tahun anggaran.
- c. Sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan daerah selama tahun anggaran.

1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Daftar APBD-1 dan Daftar K-1. Sumber data

diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil pencacahannya dicatat dengan menggunakan Daftar APBD-2 dan Daftar K-2.

1.4 Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi konsep dan definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kalimantan Tengah 2015-2016. Konsep tersebut mengacu pada istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah realisasi atau perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

A.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna

keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

A.1.1.Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah serta bangunan, dan lain-lain.

A.1.2.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/ atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat

rekreasi/ olahraga, izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

A.1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

A.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang **meliputi** hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

A.2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

A.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/ eksploitasi/ royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

A.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

A.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.

2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/ atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/ atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan yang sah lainnya.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

B.1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur

dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

B.1.1. Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

B.1.2. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

B.1.3. Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk **bantuan** biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya

perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

B.1.4. Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

B.1.5. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.1.5.1. Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

B.1.5.2. Belanja Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

B.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota, kepala desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri atas:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

B.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota, atau pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/ kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya

B.1.8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya **tidak** biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B.2. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan **dapat** diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

B.2.1. Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

B.2.2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk **pembelian**/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lainnya.

B.2.3. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio,

alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/ kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

C. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaiknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

C.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

C.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

C.1.2. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

C.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

C.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

C.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah lainnya.

C.1.6. Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

C.1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya..

C.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

C.2.1. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya diberikan dalam satu tahun anggaran.

C.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah **pengeluaran** daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

C.2.3. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

C.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau pihak ketiga.

C.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah



PAD
(Pendapatan
Asli Daerah)

6,11%

Kab/Kota

0,97

Triliun Rupiah

Pendapatan
Total

Provinsi

1,16

Triliun
Rupiah

32,64%

Tertinggi • Murung Raya
Terendah • Kotawaringin Timur

Kab/Kota

12,75 80,26%

Triliun Rupiah

Provinsi

1,88 52,98%

Triliun
Rupiah

Dana
Perimbangan

Pendapatan
Total



Belanja
Modal

28,29%

Kab/Kota

4,49

Triliun Rupiah

Belanja
Total

Provinsi

0,78

Triliun
Rupiah

24,69%

Kab/Kota

5,87 36,99%

Triliun Rupiah

Provinsi

0,67 21,02%

Triliun
Rupiah

Belanja
Pegawai

Belanja
Total



2016

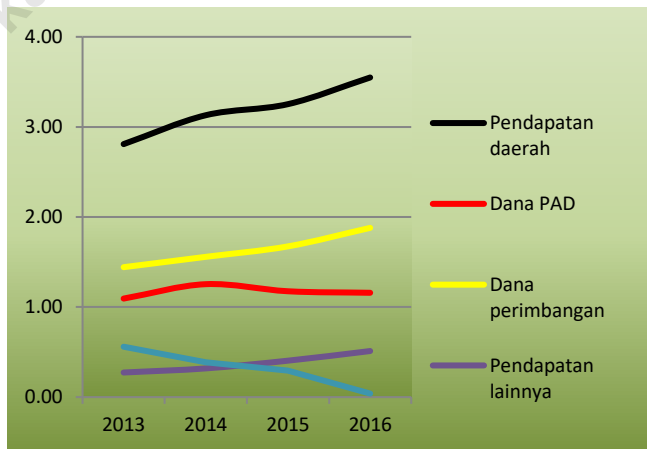
Kalimantan Tengah
masih bergantung pada
dana transfer pusat
dari APBN

BAB II ULASAN RINGKAS

2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Kebijakan alokasi penggunaan anggaran pada pendapatan dan belanja daerah, secara umum menggambarkan kebijakan fiskal dan pengelolaannya selama tahun anggaran yang berlaku. Di sisi pendapatan, komposisi sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya. Sedangkan pada sisi pengeluaran, terdiri dari belanja langsung untuk upah/gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, barang modal, serta belanja tidak langsung lainnya. Jika dilihat dari postur APBD secara keseluruhan, kontribusi pendapatan utama daerah Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2016 masih mengandalkan perolehan dari pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi, 2013-2016 (Triliun)



2.1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi

Selama tahun 2016, pendapatan daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,55 triliun rupiah, berasal dari PAD senilai 1,16 triliun rupiah, dana perimbangan senilai 1,88 triliun rupiah, dan pendapatan daerah lainnya senilai 0,51 triliun rupiah.

Tabel 2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2015-2016

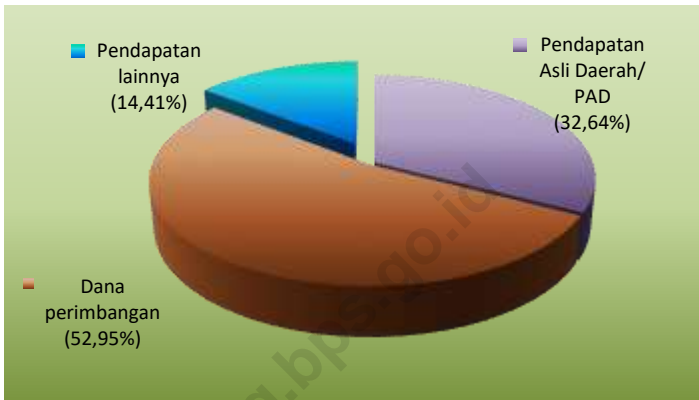
Jenis Penerimaan	2015	2016	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	3 252 747 574	3 548 504 779	9,09
1. Pendapatan Asli Daerah	1 174 969 267	1 158 303 928	-1,42
1.1. Pajak Daerah	1 019 293 669	941 491 438	-7,63
1.2. Retribusi Daerah	9 674 080	10 680 538	10,40
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	37 075 679	44 908 112	21,13
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	108 925 838	161 223 841	48,01
2. Dana Perimbangan	1 673 376 687	1 878 977 521	12,29
2.1. Bagi Hasil Pajak	117 308 743	200 298 531	70,74
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	202 946 136	142 581 089	-29,74
2.3. Dana Alokasi Umum	1 280 595 848	1 294 850 243	1,11
2.4. Dana Alokasi Khusus	72 525 960	241 247 658	232,64
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	404 401 621	511 223 329	26,41
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	294 181 384	39 349 626	-86,62
Jumlah	3 546 928 958	3 587 854 405	1,15

Dilihat dari perkembangannya selama tiga tahun terakhir, pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah cenderung meningkat. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 9,09 persen yakni dari 3,25 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 3,55 triliun rupiah di tahun 2016. Kenaikan ini relatif lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,93 persen. Namun demikian, kenaikan yang terjadi pada pendapatan daerah tidak sepenuhnya diperoleh dari potensi wilayah, termasuk pengelolaan pajak daerah. Hal ini terlihat dari PAD yang menurun 1,42 persen dibandingkan tahun lalu. Selama tahun 2016, kontribusi kenaikan pendapatan masih bertumpu pada perolehan lain-lain PAD yang sah, hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, serta retribusi daerah. Meskipun retribusi daerah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, namun nilainya jauh lebih rendah dibandingkan besaran pajak daerah.

Penerimaan daerah provinsi pada tahun 2016 masih ditopang oleh dana perimbangan (transfer) sebesar 52,95 persen, dimana terjadi peningkatan 12,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,67 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 1,88 triliun rupiah di tahun 2016. Peningkatan terutama berasal dari DAK yang mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat. Kendatipun terjadi kenaikan sebesar 70,74 persen pada pendapatan bagi hasil pajak, namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan DAK. Peningkatan DAK yang cukup tinggi secara keseluruhan dipicu oleh peningkatan DAK fisik. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Sementara itu,

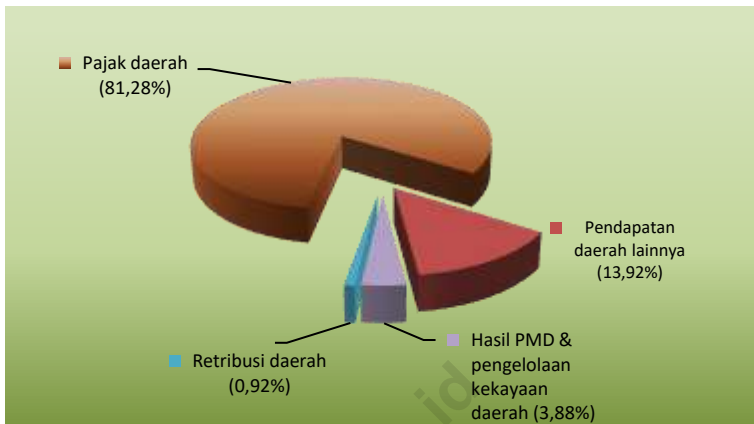
penurunan sebesar 29,74 persen pada pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam disebabkan oleh merosotnya perolehan pajak eksplorasi akibat moratorium operasional perusahaan tambang selama tahun 2016.

Grafik 2.2 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi, 2016



Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016, kontribusi terbesar didominasi dari perolehan pajak mencapai 81,28 persen dan pendapatan lainnya sebesar 13,92 persen. Sementara itu kontribusi dari retribusi dan hasil perusahaan daerah serta pengelolaannya, belum mampu menggerakkan potensi pendapatan daerah secara signifikan. Sedangkan pendapatan daerah dari dana perimbangan, masih didominasi oleh ketergantungan pada perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 68,91 persen.

Grafik 2.3 Komposisi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, 2016



Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya senilai 241,25 miliar rupiah, atau berperan sebesar 12,84 persen. Meskipun kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah hanya 14,41 persen, namun komponen pendapatan lainnya di luar PAD dan dana perimbangan, mengalami peningkatan cukup tinggi yakni sebesar 26,41 persen dibandingkan tahun 2015.

2.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi

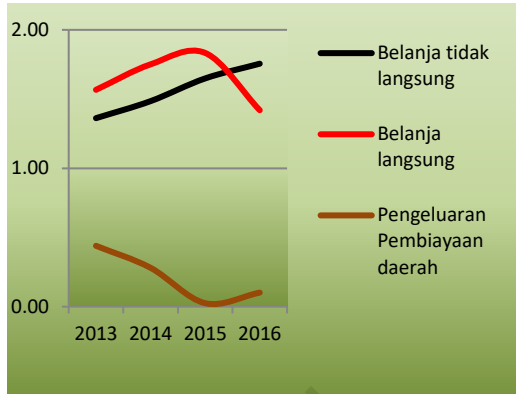
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar selama tahun anggaran. Komponen belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang tidak diperoleh pembayarannya kembali dalam satu tahun anggaran. Sejak tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah provinsi mengalami perubahan struktur dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara belanja

langsung dan tidak langsung, terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program.

Selama empat tahun terakhir, realisasi belanja tidak langsung daerah cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun. Meskipun realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2016 meningkat sebesar 6,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 1,65 triliun menjadi 1,76 triliun, namun masih lebih rendah dari kenaikan tahun 2015 yang sebesar 11,05 persen. Sebaliknya, belanja langsung selama tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 22,58 persen.

Sebagai catatan bahwa nilai belanja langsung mengalami kenaikan selama beberapa tahun sebelumnya antara 4,00 sampai dengan 12,00 persen per tahun. Penurunan tersebut terutama terjadi pada pengadaan barang dan jasa, termasuk barang modal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penghematan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016. Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan daerah lainnya terlihat berfluktuatif selama periode 2013-2016.

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi, 2013-2016 (Triliun)



Berdasarkan kontribusinya, porsi terbesar belanja daerah selama tahun 2016 berasal dari komponen belanja tidak langsung mencapai 53,58 persen, diikuti oleh belanja langsung sebesar 43,32 persen dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 3,10 persen. Pada komponen belanja tidak langsung, didominasi oleh belanja hibah mencapai 40,11 persen, diikuti oleh belanja bagi hasil dan belanja pegawai masing-masing sebesar 29,06 persen dan 28,64 persen. Sementara komponen belanja untuk bantuan sosial dan bantuan keuangan masih relatif kecil yakni masing-masing 1,92 persen dan 0,20 persen.

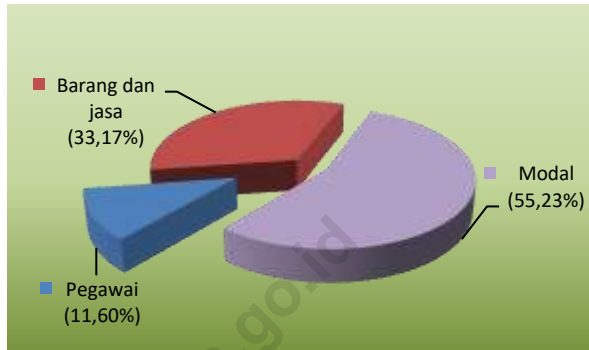
Tabel 2.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 649 116 749	1 755 341 628	6,44
1. Belanja Pegawai	434 769 090	502 777 469	15,64
2. Belanja Bunga	0	102 500	-
3. Belanja Subsidi	1 779 018	1 163 230	-34,61
4. Belanja Hibah	604 198 436	704 035 183	16,52
5. Belanja Bantuan Sosial	67 090 691	33 651 796	-49,84
6. Belanja Bagi Hasil	372 558 292	510 062 774	36,91
7. Belanja Bantuan Keuangan	165 953 964	3 548 677	-97,86
8. Belanja Tidak Terduga	2 767 260	0	-100,00
B. BELANJA LANGSUNG	1 833 317 047	1 419 364 134	-22,58
1. Belanja Pegawai	139 076 929	164 699 321	18,42
2. Belanja Barang dan Jasa	735 098 575	470 800 020	-35,95
3. Belanja Modal	959 141 543	783 864 793	-18,27
TOTAL BELANJA	3 482 433 797	3 174 705 762	-8,84
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25 085 360	101 509 990	304,66
Jumlah	3 507 519 157	3 276 215 752	-6,59

Pada komponen belanja langsung, porsi belanja pegawai cukup rendah yakni 11,60 persen. Cukup tingginya porsi belanja barang dan jasa sebesar 33,17 persen dan belanja modal sebesar 55,23 persen, diharapkan sebagai daya ungkit dalam rangka optimalisasi capaian kinerja pembangunan selama tahun anggaran dan periode berikutnya. Alokasi belanja barang dan jasa selama tahun 2016 mencapai 470,80

miliar rupiah, diikuti belanja modal senilai 783,86 miliar rupiah dan belanja pegawai senilai 164,70 miliar rupiah.

Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Belanja Langsung Daerah Provinsi, 2016



Dibandingkan dengan tahun 2015, belanja tidak langsung selama tahun 2016 meningkat dari 1,65 triliun rupiah menjadi 1,76 triliun rupiah. Dilihat dari kontribusinya terhadap keseluruhan nilai belanja daerah, peranan belanja tidak langsung meningkat dari 47,02 persen di tahun 2015 menjadi 53,58 persen di tahun 2016. Peningkatan ini diharapkan sebagai refleksi meningkatnya peran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah.

2.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2015-2016

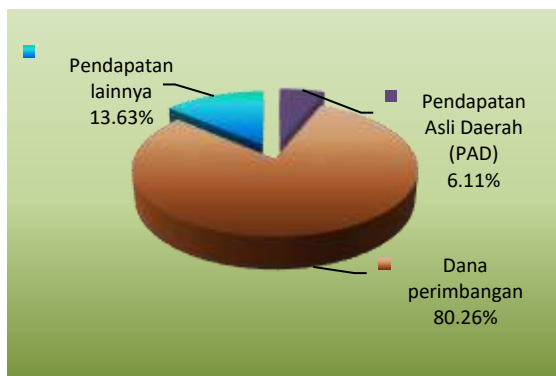
Jenis Penerimaan	2015	2016	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	13 847 222 259	15 885 111 876	14,72
1. Pendapatan Asli Daerah	894 966 067	970 533 450	8,44
1.1. Pajak Daerah	249 674 079	267 592 217	7,18
1.2. Retribusi Daerah	115 724 951	110 946 844	-4,13
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	62 085 392	70 326 503	13,27
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	467 481 645	521 667 885	11,59
2. Dana Perimbangan	10 648 920 657	12 749 929 214	19,73
2.1. Bagi Hasil Pajak	397 381 453	651 926 023	64,06
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	935 063 820	806 318 658	-13,77
2.3. Dana Alokasi Umum	8 102 037 984	8 714 258 772	7,56
2.4. Dana Alokasi Khusus	1 214 437 400	2 577 425 761	112,23
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 303 335 535	2 164 649 212	-6,02
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2 482 025 771	1 936 961 069	-21,96
Jumlah	16 329 248 030	17 822 072 945	9,14

Secara garis besar, realisasi pendapatan wilayah seluruh kabupaten/kota selama tahun 2016 tercatat 15,88 triliun rupiah. Disamping pendapatan daerah lain-lain, sumber dana utama pendapatan daerah relatif masih mengandalkan perolehan dana perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Hal ini terlihat dari cukup tingginya penerimaan dana perimbangan yang mencapai 12,75 triliun rupiah atau sebesar 80,26 persen dari keseluruhan pendapatan daerah kabupaten/kota. Tingginya kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi pasca penyelenggaraan otonomi daerah. Pembentukan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Oleh karenanya, PAD dan penerimaan daerah lainnya merupakan kekuatan finansial utama dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu

Namun demikian, kendala yang terjadi adalah masih rendahnya penerimaan daerah dari PAD pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini. Pada tahun 2016, PAD dari seluruh kabupaten/kota hanya senilai 970, 53 miliar rupiah, meskipun mengalami peningkatan sebesar 8,44 persen dari tahun sebelumnya.

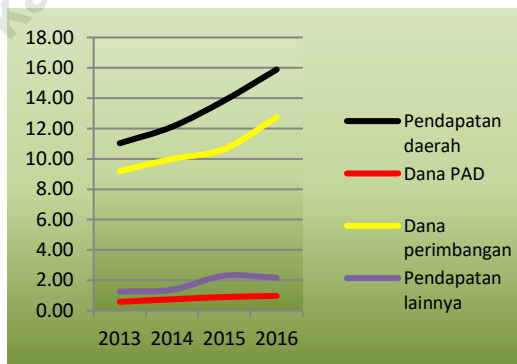
Grafik 2.6 Komposisi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota, 2016



Rasio PAD terhadap keseluruhan nilai pendapatan daerah hanya sebesar 6,11 persen, angka ini sangat rendah dibandingkan rasio PAD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap total pendapatan yang mencapai 32,64 persen. Hal ini Hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemandirian hampir seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota relatif masih rendah dan sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Selama empat tahun terakhir, realisasi penerimaan dari PAD pemerintah daerah kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan, meskipun kontribusinya terhadap jumlah nilai pendapatan daerah masih cukup rendah. Nilai PAD umumnya berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya di luar hasil pengelolaan usaha milik daerah.

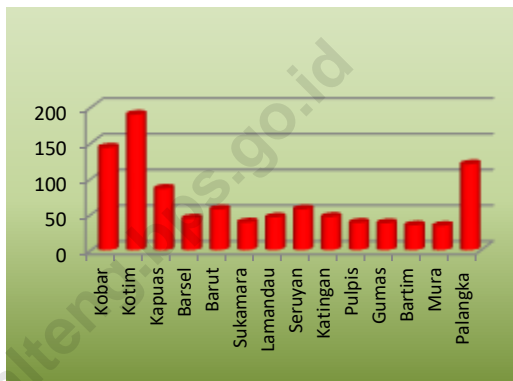
Grafik 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, 2013-2016 (Triliun)



Selama tahun 2016, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki rasio PAD tertinggi dibandingkan 13 kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai

19,51 persen atau senilai 189,39 miliar rupiah. Capaian PAD Kabupaten Kotawaringin Timur melebihi target sebelumnya yang hanya senilai 180,02 miliar rupiah. Tingginya penerimaan pendapatan dari PAD terutama berasal dari pajak dan pendapatan lainnya. Sementara itu, rasio PAD terendah di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi di Kabupaten Murung Raya yaitu hanya sebesar 3,49 persen.

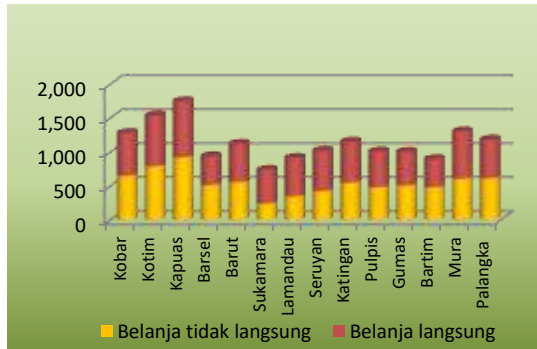
Grafik 2.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota, 2016 (Miliar)



2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana pada sisi penerimaan pendapatan daerah, pengeluaran daerah selama tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 12,15 persen atau mencapai 15,87 triliun rupiah. Berdasarkan strukturnya, total belanja langsung dan tidak langsung masing-masing meningkat 9,20 persen dan 15,47 persen. Peningkatan belanja tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup tinggi pada belanja bantuan keuangan dan belanja bunga masing-masing sebesar 71,51 persen dan 50,74 persen.

Grafik 2.9 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota, 2016 (Miliar)



Pemerintah daerah kabupaten/kota mengurangi porsi belanja langsung dari 52,91 persen di tahun 2015 menjadi 51,52 persen di tahun 2016. Porsi belanja tidak langsung meningkat dari 47,09 persen di tahun 2015 menjadi 48,48 persen di tahun 2016. Belanja modal yang diharapkan mampu menjadi sumber daya untuk percepatan pembangunan di bidang ekonomi selama tahun 2016, justru hanya meningkat 8,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja cukup tinggi yaitu mencapai 28,29 persen di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah kabupaten/kota relatif masih berorientasi pada pembiayaan program jangka pendek.

Dari empat belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, belanja daerah tertinggi selama tahun 2016 berasal dari Kabupaten Kapuas sebesar 1,75 triliun, diikuti Kotawaringin Timur (1,54 triliun), Murung Raya (1,31 triliun), Kotawaringin Barat (1,28 triliun), dan Kota Palangka Raya (1,18 triliun). Adapun alokasi belanja daerah terendah terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 739 miliar.

Tabel 2.4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016	Perub. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	6 662 147 946	7 692 774 387	15,47
1. Belanja Pegawai	5 006 158 618	5 285 440 114	5,58
2. Belanja Bunga	3 744 837	5 644 912	50,74
3. Belanja Subsidi	12 180 484	9 695 087	-20,40
4. Belanja Hibah	603 709 925	666 020 195	10,32
5. Belanja Bantuan Sosial	30 260 661	26 704 395	-11,75
6. Belanja Bagi Hasil	19 101 093	20 067 115	5,06
7. Belanja Bantuan Keuangan	977 608 895	1 676 740 510	71,51
8. Belanja Tidak Terduga	9 383 432	2 462 060	-73,76
B. BELANJA LANGSUNG	7 485 421 387	8 173 940 197	9,20
1. Belanja Pegawai	518 666 149	583 941 610	12,59
2. Belanja Barang dan Jasa	2 836 308 365	3 101 913 247	9,36
3. Belanja Modal	4 130 446 872	4 488 085 341	8,66
TOTAL BELANJA	14 147 569 332	15 866 714 585	12,15
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	273 087 376	169 246 103	-38,02
Jumlah	14 420 656 708	16 035 960 688	11,20



<https://kalteng.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	3 252 747 574	3 548 504 779
1. Pendapatan Asli Daerah	1 174 969 267	1 158 303 928
1.1. Pajak Daerah	1 019 293 669	941 491 438
1.2. Retribusi Daerah	9 674 080	10 680 538
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	37 075 679	44 908 112
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	108 925 838	161 223 841
2. Dana Perimbangan	1 673 376 687	1 878 977 521
2.1. Bagi Hasil Pajak	117 308 743	200 298 531
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	202 946 136	142 581 089
2.3. Dana Alokasi Umum	1 280 595 848	1 294 850 243
2.4. Dana Alokasi Khusus	72 525 960	241 247 658
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	404 401 621	511 223 329
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	294 181 384	39 349 626
Jumlah	3 546 928 958	3 587 854 405

Lampiran 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 649 116 749	1 755 341 628
1. Belanja Pegawai	434 769 090	502 777 469
2. Belanja Bunga	0	102 500
3. Belanja Subsidi	1 779 018	1 163 230
4. Belanja Hibah	604 198 436	704 035 183
5. Belanja Bantuan Sosial	67 090 691	33 651 796
6. Belanja Bagi Hasil	372 558 292	510 062 774
7. Belanja Bantuan Keuangan	165 953 964	3 548 677
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 767 260	0
B. BELANJA LANGSUNG	1 833 317 047	1 419 364 134
1. Belanja Pegawai	139 076 929	164 699 321
2. Belanja Barang dan Jasa	735 098 575	470 800 020
3. Belanja Modal	959 141 543	783 864 793
TOTAL BELANJA	3 482 433 797	3 174 705 762
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25 085 360	101 509 990
Jumlah	3 507 519 157	3 276 215 752

Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribuan Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	13 847 222 259	15 885 111 876
1. Pendapatan Asli Daerah	894 966 067	970 533 450
1.1. Pajak Daerah	249 674 079	267 592 217
1.2. Retribusi Daerah	115 724 951	110 946 844
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	62 085 392	70 326 503
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	467 481 645	521 667 885
2. Dana Perimbangan	10 648 920 657	12 749 929 214
2.1. Bagi Hasil Pajak	397 381 453	651 926 023
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	935 063 820	806 318 658
2.3. Dana Alokasi Umum	8 102 037 984	8 714 258 772
2.4. Dana Alokasi Khusus	1 214 437 400	2 577 425 761
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 303 335 535	2 164 649 212
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2 482 025 771	1 936 961 069
Jumlah	16 329 248 030	17 822 072 945

Lampiran 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	6 662 147 946	7 692 774 387
1. Belanja Pegawai	5 006 158 618	5 285 440 114
2. Belanja Bunga	3 744 837	5 644 912
3. Belanja Subsidi	12 180 484	9 695 087
4. Belanja Hibah	603 709 925	666 020 195
5. Belanja Bantuan Sosial	30 260 661	26 704 395
6. Belanja Bagi Hasil	19 101 093	20 067 115
7. Belanja Bantuan Keuangan	977 608 895	1 676 740 510
8. Pengeluaran Tidak Terduga	9 383 432	2 462 060
B. BELANJA LANGSUNG	7 485 421 387	8 173 940 197
1. Belanja Pegawai	518 666 149	583 941 610
2. Belanja Barang dan Jasa	2 836 308 365	3 101 913 247
3. Belanja Modal	4 130 446 872	4 488 085 341
TOTAL BELANJA	14 147 569 332	15 866 714 585
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	273 087 376	169 246 103
Jumlah	14 420 656 708	16 035 960 688

Lampiran 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 041 107 474	1 322 594 839
1. Pendapatan Asli Daerah	123 315 124	143 330 742
1.1. Pajak Daerah	26 686 999	33 359 659
1.2. Retribusi Daerah	13 694 383	14 203 972
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6 298 062	7 050 925
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	76 635 680	88 716 185
2. Dana Perimbangan	710 868 976	999 504 184
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 401 013	55 399 544
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35 227 710	20 357 621
2.3. Dana Alokasi Umum	614 824 773	662 249 343
2.4. Dana Alokasi Khusus	34 415 480	261 497 676
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	206 923 374	179 759 912
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	141 640 133	99 156 972
Jumlah	1 182 747 606	1 421 751 811

Lampiran 6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	507 768 746	649 484 547
1. Belanja Pegawai	379 928 196	466 082 653
2. Belanja Bunga	0	858 681
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	35 316 960	54 837 902
5. Belanja Bantuan Sosial	843 350	354 550
6. Belanja Bagi Hasil	2 942 069	1 980 543
7. Belanja Bantuan Keuangan	86 903 488	125 252 605
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 834 684	117 614
B. BELANJA LANGSUNG	564 378 128	631 464 228
1. Belanja Pegawai	69 966 773	50 370 524
2. Belanja Barang dan Jasa	198 592 312	198 455 358
3. Belanja Modal	295 819 043	382 638 346
TOTAL BELANJA	1 072 146 874	1 280 948 775
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11 500 000	40 498 000
Jumlah	1 083 646 874	1 321 446 775

Lampiran 7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 417 508 898	1 683 342 256
1. Pendapatan Asli Daerah	159 190 201	189 388 000
1.1. Pajak Daerah	38 005 168	53 246 842
1.2. Retribusi Daerah	12 813 832	13 559 723
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5 747 691	5 772 224
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	102 623 510	116 809 211
2. Dana Perimbangan	968 516 728	1 203 679 292
2.1. Bagi Hasil Pajak	54 784 110	135 928 824
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	72 302 515	19 674 212
2.3. Dana Alokasi Umum	788 804 313	832 526 925
2.4. Dana Alokasi Khusus	52 625 790	215 549 330
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	289 801 968	290 274 964
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	220 706 918	183 178 562
Jumlah	1 638 215 816	1 866 520 818

Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	749 026 116	791 847 149
1. Belanja Pegawai	521 720 765	517 182 196
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	91 949 428	46 358 977
5. Belanja Bantuan Sosial	3 509 797	1 675 555
6. Belanja Bagi Hasil	3 451 759	5 376 063
7. Belanja Bantuan Keuangan	127 751 655	221 049 008
8. Pengeluaran Tidak Terduga	642 712	205 351
B. BELANJA LANGSUNG	690 608 428	748 180 774
1. Belanja Pegawai	16 540 783	21 626 380
2. Belanja Barang dan Jasa	384 519 460	432 918 924
3. Belanja Modal	289 548 185	293 635 470
TOTAL BELANJA	1 439 634 544	1 540 027 922
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15 370 000	5 370 000
Jumlah	1 455 004 544	1 545 397 922

Lampiran 9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 499 665 183	1 715 688 786
1. Pendapatan Asli Daerah	89 107 923	85 832 949
1.1. Pajak Daerah	18 654 680	13 800 062
1.2. Retribusi Daerah	6 482 176	5 974 088
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3 348 728	3 935 747
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	60 622 339	62 123 053
2. Dana Perimbangan	1 101 954 398	1 386 674 190
2.1. Bagi Hasil Pajak	21 163 615	69 527 795
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	83 667 816	96 795 165
2.3. Dana Alokasi Umum	820 035 397	881 812 337
2.4. Dana Alokasi Khusus	177 087 570	338 538 892
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	308 602 861	243 181 647
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	236 882 711	248 730 564
Jumlah	1 736 547 894	1 964 419 351

Lampiran 10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	742 087 773	922 371 561
1. Belanja Pegawai	626 040 631	653 880 817
2. Belanja Bunga	2 182 540	3 275 547
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	12 385 834	26 629 407
5. Belanja Bantuan Sosial	3 923 430	2 345 906
6. Belanja Bagi Hasil	638 589	2 443 252
7. Belanja Bantuan Keuangan	95 575 660	232 669 640
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 341 087	1 126 992
B. BELANJA LANGSUNG	742 299 756	826 473 274
1. Belanja Pegawai	38 139 426	53 552 427
2. Belanja Barang dan Jasa	291 357 829	252 879 977
3. Belanja Modal	412 802 501	520 040 870
TOTAL BELANJA	1 484 387 529	1 748 844 835
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3 500 000	11 269 200
Jumlah	1 487 887 529	1 760 114 035

Lampiran 11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	853 554 305	932 032 770
1. Pendapatan Asli Daerah	38 343 110	44 019 870
1.1. Pajak Daerah	6 643 960	6 452 131
1.2. Retribusi Daerah	3 922 328	3 553 262
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5 253 635	5 440 119
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	22 523 186	28 574 358
2. Dana Perimbangan	697 772 124	785 114 703
2.1. Bagi Hasil Pajak	26 540 558	28 544 333
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	43 060 972	18 426 952
2.3. Dana Alokasi Umum	570 135 858	583 667 676
2.4. Dana Alokasi Khusus	58 034 736	154 475 743
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	117 439 072	102 898 197
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	111 937 850	98 427 571
Jumlah	965 492 156	1 030 460 341

Lampiran 12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	441 929 608	514 478 019
1. Belanja Pegawai	351 183 969	359 973 666
2. Belanja Bunga	12 571	7 588
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	12 949 293	45 086 359
5. Belanja Bantuan Sosial	2 624 153	4 450 296
6. Belanja Bagi Hasil	2 004 900	781 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	72 649 422	104 179 110
8. Pengeluaran Tidak Terduga	505 299	0
B. BELANJA LANGSUNG	417 678 249	425 120 439
1. Belanja Pegawai	38 560 879	666 906
2. Belanja Barang dan Jasa	201 048 727	260 971 124
3. Belanja Modal	178 068 643	163 482 408
TOTAL BELANJA	859 607 856	939 598 457
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7 378 000	5 873 784
Jumlah	866 985 856	945 472 241

Lampiran 13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	978 153 929	1 219 855 290
1. Pendapatan Asli Daerah	50 310 290	56 816 976
1.1. Pajak Daerah	6 617 788	9 595 705
1.2. Retribusi Daerah	4 103 440	4 339 172
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4 831 224	5 689 135
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	34 757 838	37 192 964
2. Dana Perimbangan	787 270 189	980 110 720
2.1. Bagi Hasil Pajak	38 269 901	64 507 841
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	107 754 294	167 416 316
2.3. Dana Alokasi Umum	517 551 314	569 672 938
2.4. Dana Alokasi Khusus	123 694 680	178 513 625
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	140 573 450	182 927 593
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	419 686 084	205 274 418
Jumlah	1 397 840 013	1 425 129 708

Lampiran 14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	513 025 941	557 651 814
1. Belanja Pegawai	381 025 389	403 908 154
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	35 369 493	32 769 763
5. Belanja Bantuan Sosial	502 883	360 628
6. Belanja Bagi Hasil	1 825 800	1 363 520
7. Belanja Bantuan Keuangan	94 131 725	119 162 099
8. Pengeluaran Tidak Terduga	170 650	87 650
B. BELANJA LANGSUNG	557 775 903	564 784 069
1. Belanja Pegawai	29 736 388	36 958 427
2. Belanja Barang dan Jasa	172 438 146	217 287 183
3. Belanja Modal	355 601 368	310 538 459
TOTAL BELANJA	1 070 801 844	1 122 435 883
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	148 246 400	18 246 400
Jumlah	1 219 048 244	1 140 682 283

Lampiran 15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	683 998 196	744 507 431
1. Pendapatan Asli Daerah	29 733 929	38 622 541
1.1. Pajak Daerah	4 067 617	5 003 197
1.2. Retribusi Daerah	10 920 256	11 229 576
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6 520 936	6 685 826
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	8 225 119	15 703 941
2. Dana Perimbangan	594 083 469	667 202 394
2.1. Bagi Hasil Pajak	14 460 871	27 818 233
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28 547 613	18 193 054
2.3. Dana Alokasi Umum	407 283 888	428 055 095
2.4. Dana Alokasi Khusus	143 791 096	193 136 012
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	60 180 799	38 682 497
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48 666 339	51 334 327
Jumlah	732 664 535	795 841 759

Lampiran 16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	233 639 191	240 144 843
1. Belanja Pegawai	132 453 367	141 597 943
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	40 731 639	30 302 531
5. Belanja Bantuan Sosial	1 004 525	552 015
6. Belanja Bagi Hasil	2 524 998	1 600 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	56 924 662	66 092 354
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	435 132 435	499 013 149
1. Belanja Pegawai	36 819 068	41 370 591
2. Belanja Barang dan Jasa	105 643 908	114 209 830
3. Belanja Modal	292 669 459	343 432 729
TOTAL BELANJA	668 771 626	739 157 993
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14 500 000	15 850 903
Jumlah	683 271 626	755 008 896

Lampiran 17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	812 642 037	943 106 233
1. Pendapatan Asli Daerah	42 093 087	45 563 688
1.1. Pajak Daerah	14 908 230	15 900 716
1.2. Retribusi Daerah	5 949 159	7 507 122
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4 760 650	4 917 574
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	16 475 048	17 238 276
2. Dana Perimbangan	668 881 550	762 929 163
2.1. Bagi Hasil Pajak	22 371 481	33 863 323
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	41 920 204	32 303 061
2.3. Dana Alokasi Umum	433 768 085	466 229 206
2.4. Dana Alokasi Khusus	170 821 780	230 533 573
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	101 667 401	134 613 382
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	134 643 471	125 983 908
Jumlah	947 285 509	1 069 090 141

Lampiran 18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	305 012 509	348 353 450
1. Belanja Pegawai	212 142 345	241 982 575
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	35 071 087	14 439 498
5. Belanja Bantuan Sosial	1 217 888	1 696 633
6. Belanja Bagi Hasil	1 548 473	1 074 967
7. Belanja Bantuan Keuangan	55 032 716	89 159 776
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	502 659 092	566 793 598
1. Belanja Pegawai	35 710 852	49 057 010
2. Belanja Barang dan Jasa	126 963 897	184 607 007
3. Belanja Modal	339 984 344	333 129 581
TOTAL BELANJA	807 671 601	915 147 049
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13 630 000	12 230 000
Jumlah	821 301 601	927 377 049

**Lampiran 19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
(Ribu Rupiah), 2015-2016**

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	825 525 393	1 042 119 075
1. Pendapatan Asli Daerah	37 931 102	56 880 204
1.1. Pajak Daerah	7 963 630	7 470 165
1.2. Retribusi Daerah	6 811 982	8 807 509
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5 579 549	5 435 728
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	17 575 942	35 166 802
2. Dana Perimbangan	690 199 552	865 979 159
2.1. Bagi Hasil Pajak	43 982 911	65 837 033
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	51 418 314	81 301 493
2.3. Dana Alokasi Umum	563 570 718	621 428 614
2.4. Dana Alokasi Khusus	31 227 610	97 412 019
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	97 394 738	119 259 712
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	286 669 836	225 225 173
Jumlah	1 112 195 229	1 267 344 248

Lampiran 20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	348 531 532	427 856 232
1. Belanja Pegawai	228 200 946	241 785 853
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	1 838 925	0
4. Belanja Hibah	42 585 353	42 904 729
5. Belanja Bantuan Sosial	2 035 516	313 192
6. Belanja Bagi Hasil	1 374 976	1 301 425
7. Belanja Bantuan Keuangan	72 495 815	141 551 034
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	530 438 524	594 261 416
1. Belanja Pegawai	49 011 928	58 360 745
2. Belanja Barang dan Jasa	156 647 159	178 170 193
3. Belanja Modal	324 779 438	357 730 478
TOTAL BELANJA	878 970 056	1 022 117 648
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8 000 000	6 500 000
Jumlah	886 970 056	1 028 617 648

Lampiran 21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 066 081 724	1 124 910 927
1. Pendapatan Asli Daerah	40 799 553	46 280 722
1.1. Pajak Daerah	10 250 509	11 754 994
1.2. Retribusi Daerah	2 306 261	3 228 625
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3.619.255	4 143 124
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	24 623 528	27 153 979
2. Dana Perimbangan	852 822 612	918 845 149
2.1. Bagi Hasil Pajak	25 345 889	22 570 023
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	89 355 476	68 107 862
2.3. Dana Alokasi Umum	668 100 108	708 751 031
2.4. Dana Alokasi Khusus	70 021 140	119 416 234
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	172 459 558	159 785 055
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	167 758 860	154 601 396
Jumlah	1 233 840 584	1 279 512 323

Lampiran 22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	469 737 945	549 252 245
1. Belanja Pegawai	345 078 227	362 910 191
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	1 800 000	1 449 919
4. Belanja Hibah	50 687 476	59 400 950
5. Belanja Bantuan Sosial	544 000	2 474 732
6. Belanja Bagi Hasil	1 399 397	1 154 195
7. Belanja Bantuan Keuangan	69 832 235	121 862 258
8. Pengeluaran Tidak Terduga	396 609	0
B. BELANJA LANGSUNG	602 823 377	605 306 568
1. Belanja Pegawai	35 322 706	36 538 216
2. Belanja Barang dan Jasa	229 400 863	259 328 393
3. Belanja Modal	338 099 808	309 439 959
TOTAL BELANJA	1 072 561 322	1 154 558 813
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7 000 000	10 000 000
Jumlah	1 079 561 322	1 164 558 813

Lampiran 23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	905 923 622	995 212 870
1. Pendapatan Asli Daerah	36 487 816	38 078 420
1.1. Pajak Daerah	7 004 204	9 579 310
1.2. Retribusi Daerah	12 145 143	14 514 773
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.288.540	2 505 515
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	15 049 929	11 478 822
2. Dana Perimbangan	718 770 095	844 581 498
2.1. Bagi Hasil Pajak	15 984 395	19 429 689
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 055 283	18 650 949
2.3. Dana Alokasi Umum	522 284 767	576 640 254
2.4. Dana Alokasi Khusus	153 445 650	229 860 606
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	150 665 711	112 552 952
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	87 255 219	60 565 547
Jumlah	993 178 841	1 055 778 417

Lampiran 24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	409 391 865	481 536 833
1. Belanja Pegawai	305 857 673	328 668 659
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	51 717 497	62 358 630
5. Belanja Bantuan Sosial	604 350	1 896 000
6. Belanja Bagi Hasil	582 632	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	48 822 405	88 333 573
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 807 307	279 971
B. BELANJA LANGSUNG	519 221 429	529 086 793
1. Belanja Pegawai	18 916 247	20 126 648
2. Belanja Barang dan Jasa	153 189 456	160 379 407
3. Belanja Modal	347 115 725	348 580 737
TOTAL BELANJA	928 613 294	1 010 623 626
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4 000 000	11 000 000
Jumlah	932 613 294	1 021 623 626

Lampiran 25. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	837 364 873	980 695 989
1. Pendapatan Asli Daerah	32 587 769	37 472 945
1.1. Pajak Daerah	6 363 022	7 992 486
1.2. Retribusi Daerah	2 403 154	2 808 393
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.618.229	5 337 698
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	19 203 365	21 334 367
2. Dana Perimbangan	666 962 242	824 244 038
2.1. Bagi Hasil Pajak	15 729 297	33 537 407
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	52 807 052	53 996 146
2.3. Dana Alokasi Umum	533 355 913	564 028 300
2.4. Dana Alokasi Khusus	65 069 980	172 682 185
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	137 814 861	118 979 006
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	77 940 643	77 303 954
Jumlah	915 305 515	1 057 999 943

Lampiran 26. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	414 558 421	506 684 780
1. Belanja Pegawai	320 642 660	338 040 743
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	38 486 199	30 073 955
5. Belanja Bantuan Sosial	592 860	671 962
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	54 812 201	137 841 620
8. Pengeluaran Tidak Terduga	24 500	56 500
B. BELANJA LANGSUNG	416 733 640	496 790 265
1. Belanja Pegawai	25 928 982	41 980 935
2. Belanja Barang dan Jasa	155 319 130	161 967 118
3. Belanja Modal	235 485 527	292 842 212
TOTAL BELANJA	831 292 061	1 003 475 045
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6 709 500	7 550 000
Jumlah	838 001 561	1 011 025 045

Lampiran 27. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	799 820 929	857 330 973
1. Pendapatan Asli Daerah	37 869 997	34 431 777
1.1. Pajak Daerah	5 518 677	7 048 181
1.2. Retribusi Daerah	5 109 931	2 722 709
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3 644 726	6 470 006
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	23 596 664	18 190 882
2. Dana Perimbangan	624 551 490	690 787 003
2.1. Bagi Hasil Pajak	31 704 628	23 638 639
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	69 424 259	41 515 876
2.3. Dana Alokasi Umum	468 744 476	482 815 506
2.4. Dana Alokasi Khusus	54 678 128	142 816 983
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	137 399 441	132 112 192
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	131 698 290	94 504 395
Jumlah	931 519 219	951 835 368

Lampiran 28. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	441 039 189	482 858 322
1. Belanja Pegawai	321 649 250	317 968 105
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	450 000	450 000
4. Belanja Hibah	40 664 885	41 302 217
5. Belanja Bantuan Sosial	590 939	268 660
6. Belanja Bagi Hasil	0	2 234 650
7. Belanja Bantuan Keuangan	77 684 115	120 634 690
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	380 584 179	415 369 956
1. Belanja Pegawai	997 774	6 471 461
2. Belanja Barang dan Jasa	216 142 971	250 503 503
3. Belanja Modal	163 443 434	158 394 992
TOTAL BELANJA	821 623 368	898 228 278
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15 000 000	7 400 000
Jumlah	836 623 368	905 628 278

Lampiran 29. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 053 882 350	1 195 030 568
1. Pendapatan Asli Daerah	54 881 449	33 853 527
1.1. Pajak Daerah	22 569 446	7 226 675
1.2. Retribusi Daerah	13 896 721	3 011 165
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4 185 228	4 796 758
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	14 230 054	18 818 930
2. Dana Perimbangan	859 177 820	1 033 953 476
2.1. Bagi Hasil Pajak	41 873 774	43 521 697
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	204 878 750	151 182 589
2.3. Dana Alokasi Umum	593 989 575	678 555 108
2.4. Dana Alokasi Khusus	18 435 720	160 694 081
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	139 823 082	127 223 566
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	321 794 776	209 003 599
Jumlah	1 375 677 127	1 404 034 167

Lampiran 30. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	497 051 674	606 531 187
1. Belanja Pegawai	321 646 502	366 171 534
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	8 091 559	7 795 168
4. Belanja Hibah	94 627 891	120 328 651
5. Belanja Bantuan Sosial	7 839 910	4 248 360
6. Belanja Bagi Hasil	807 500	757 500
7. Belanja Bantuan Keuangan	63 913 312	106 641 991
8. Pengeluaran Tidak Terduga	125 000	587 982
B. BELANJA LANGSUNG	662 371 854	699 099 103
1. Belanja Pegawai	78 803 234	87 703 781
2. Belanja Barang dan Jasa	232 203 825	222 882 439
3. Belanja Modal	351 364 795	388 512 882
TOTAL BELANJA	1 159 423 528	1 305 630 289
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7 250 000	5 250 000
Jumlah	1 166 673 528	1 310 880 289

Lampiran 31. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Penerimaan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 071 993 347	1 128 683 869
1. Pendapatan Asli Daerah	122 314 717	119 961 089
1.1. Pajak Daerah	74 420 150	79 162 092
1.2. Retribusi Daerah	15 166 186	15 486 757
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1 388 939	2 146 125
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	31 339 442	23 166 115
2. Dana Perimbangan	707 089 412	786 324 244
2.1. Bagi Hasil Pajak	18 769 010	27 801 643
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 643 563	18 397 361
2.3. Dana Alokasi Umum	599 588 799	657 826 439
2.4. Dana Alokasi Khusus	61 088 040	82 298 801
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	242 589 218	222 398 536
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	94 744 641	103 670 682
Jumlah	1 166 737 988	1 232 354 552

Lampiran 32. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2015-2016

Jenis Pengeluaran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	589 347 437	613 723 406
1. Belanja Pegawai	558 588 696	545 287 026
2. Belanja Bunga	1 549 725	1 503 096
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	21 166 889	59 226 626
5. Belanja Bantuan Sosial	4 427 061	5 395 906
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 079 483	2 310 751
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 535 583	0
B. BELANJA LANGSUNG	462 716 393	572 196 565
1. Belanja Pegawai	44 211 109	79 157 558
2. Belanja Barang dan Jasa	212 840 682	207 352 789
3. Belanja Modal	205 664 601	285 686 219
TOTAL BELANJA	1 052 063 829	1 185 919 971
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11 003 476	12 207 816
Jumlah	1 063 067 305	1 198 127 787

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No. 06, Palangka Raya, 73112

Telp: (0536) 3228105, Fax: (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: bps6200@bps.go.id

ISBN 978-602-6774-94-1



9 786026 774941